

KORBAN JAJAK PENDAPAT DI TIMOR TIMUR, 1999

TYAS SUARTIKA

Jurusan Pendidikan Sejarah
 Fakultas Ilmu Sosial
 Universitas Negeri Surabaya
 E-Mail: tyassuartika@gmail.com

Corry Liana

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial
 Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Kesuksesan rakyat Indonesia dalam melengserkan tirani Orde Baru pada tahun 1998, telah mengobarkan semangat perlawanan rakyat Timor Timur kepada pemerintah Indonesia. Saat Reformasi mulai berjalan dibawah pemerintahan Presiden Habibie, Timor Timur kembali bergejolak. Presiden Habibie mengeluarkan opsi otonomi khusus untuk menyelesaikan perlawanan di Timor Timur. Namun perlawanan belum juga dapat diredam, sehingga kebijakan baru telah diambil oleh pemerintah, yaitu dengan diberikannya opsi kedua dengan pertimbangan aspirasi rakyat, yaitu merdeka. Dua opsi yang diberikan pemerintah justru memicu konflik antara pihak pro-otonomi dan pihak pro-kemerdekaan hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Penelitian ini berusaha menjawab tentang: permasalahan Timor Timur yang harus diselesaikan dengan jajak pendapat, proses jajak pendapat dan korban yang jatuh akibat proses jajak pendapat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah, meliputi: heuristik yaitu pengumpulan sumber sejarah yang dilakukan di ANRI berupa arsip permohonan pengintegrasian Timor Timur ke wilayah Indonesia serta Keppres tentang penetapan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 di Indonesia. Perpustakaan Nasional berupa koran harian Kompas, Republika dan Majalah Tempo tahun 1975 dan 1999. Langkah berikutnya adalah Kritik yaitu tahap menelaah sumber, interpretasi yaitu tahap melakukan analisis terhadap fakta yang ditemukan dari sumber primer dan sekunder dan historiografi yaitu penyajian hasil laporan penelitian dalam bentuk tulisan dengan penulisan sejarah.

Hasil penelitian ditemukan bahwa jajak pendapat di Timor Timur harus dilakukan dengan pertimbangan bahwa nasib Timor Timur tidak bisa hanya ditentukan oleh Jakarta, melainkan juga harus ditentukan oleh rakyat Timor Timur. Peristiwa jajak pendapat di Timor Timur tahun 1999 telah menelan korban baik dari pihak pro-otonomi maupun pihak pro-kemerdekaan. Beberapa dari mereka meninggal, luka-luka atau harus mengungsi. Kejahatan yang terjadi antara lain adalah pembunuhan, penganiayaan, kekerasan pada wanita dan pemindahan anak Timor Timur. Sepanjang jajak pendapat tahun 1999, telah tercatat setidaknya 5297 orang, yang terdiri dari 149 orang tewas, 4 orang luka-luka, 5150 orang mengungsi dan 23 kejahatan terhadap wanita.

Kata kunci : Korban, Jajak Pendapat, Timor Timur

Abstract

The success of the Indonesian to take over the power of Orde Baru in 1998, has inflamed the Timor Timur dweller's opposition spirit to the Indonesian government. At the moment reformation started to set in motion by President Habibie, Timor Timur backed in the anxious condition. President Habibie issued a certain autonomy option to resolve the opposition in Timor Timur. However the opposition has not been able to be resolved, so that the new policy has been taken by government, namely the issue of second options by considerate the citizens' aspiration, which is independent. Two options given by the government led to conflict between pro-autonomy and pro-independent, it caused several people killed. This study to define about: Timor Timur problem that have to be solved by referendum, the process of the referendum, and the victims caused by process of the referendum.

The methode used is historical research, which are: heuristic, which is collecting historical sources from ANRI in a form of petition archive of Timor Timur integration into Indonesia territory and presidents policy of the establishment Timor Timur as the 27th province of Indonesia. National library, which are Kompas daily newspaper. Republika, and Tempo magazine in 1975 and 1999. The next step is the criticism, which is the stage of reviewing the sources. Interpretation is the step of analyzing the fact found from primary sources and secondary sources. Historiography is the presentation toward result of study in a form of writing with the history writing.

The study show that referendum have to be done by considerate that the Timor Timur's future cannor only be determined by Jakarta, but also by the dwellers itself. Referendum in Timor Timur at 1999 has caused many victims of both pro-autonomy and pro-independence. Some of them were died, injured, or have to be displace. The crime also happened, they were murdere, torture, violence agains women, and the removal of Timor Timur's children.

Throughout the referendum in 1999, it was recorded at least 5297 people, which were 149 were killed, 4 were injured, 5150 were displaced, and 23 crimes against woman.

Keywords: victims, referendum, Timor Timur

PENDAHULUAN

Timor Timur merupakan wilayah jajahan Portugis sejak awal abad ke-16. Revolusi Bunga yang terjadi di Portugis pada 25 April 1974 menyebabkan perubahan yang sangat besar terhadap kebijakan politik kolonisasi Portugis di Afrika dan di Timor Timur. Pemerintah Revolusioner mengumumkan kebijakan hak penentuan nasib sendiri yang akan segera diberikan kepada wilayah jajahan Portugis.¹

Mendengar pengumuman tersebut para elit di Timor Timur mulai mendirikan berbagai perhimpunan, antara lain UDT (*Uniao Democratica Timorese*), KOTA (*Klibur Oan Timor Aswain*), Apodeti (*Asociacao Popular Democratica Timorese*) dan Fretelin (*Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente*). Fretelin yang dulunya bernama ASDT (*Associacao Popular Democratica Timorese*) merupakan partai revolusioner dan radikal dalam memperjuangkan kemerdekaan Timor-Timur.

Melihat perkembangan situasi dari Fretelin yang semakin merajalela, tokoh-tokoh UDT, KOTA dan Apodeti mengadakan pertemuan di Maliana. Mereka meyakini bahwa integrasi dengan Indonesia adalah jalan keluar yang paling baik bagi masa depan Timor Timur. Perundingan tersebut berujung pada dibuatnya Deklarasi Balibo pada tanggal 30 November 1975. Inti dari deklarasi tersebut menyatakan kehendak Timor-Timur untuk integrasi dengan Republik Indonesia.²

Pada 31 Mei 1976 di Dili, ibukota Portugis, diadakan sebuah upacara singkat yang diberi nama "Tindakan Integrasi" oleh Majelis Perwakilan Rakyat Timor-Timur untuk menyampaikan petisi integrasi Timor Portugis ke dalam wilayah Republik Indonesia.³ Deklarasi ini dikenal dengan sebutan Deklarasi Balibo, yang kemudian disahkan oleh DPR tanggal 15 Juli 1976 dan ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 17 Juli 1976, sebagai Undang-Undang No. 7 Tahun 1976, yang isinya menerima Timor-Timur sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia, dan menjadikan Timor Timur sebagai provinsi ke-27.

Tahun 1991, saat Indonesia berada dibawah pemerintahan presiden Soeharto, Timor Timur tetap dipertahankan supaya tidak lepas dari Indonesia. Namun iklim politik di Indonesia juga berkembang dengan cepat, saat rakyat Indonesia merasa tidak puas akan pemerintahan yang dilakukan oleh presiden Soeharto karena telah banyak terjadi korupsi dan kasus HAM yang diabaikan. Akhirnya tahun 1998 reformasi terjadi di

Indonesia. Presiden Soeharto diturunkan dari jabatannya oleh rakyat Indonesia, dan Habibie menggantikan posisi Soeharto sebagai Presiden. Pada masa pemerintahan Habibie, permasalahan Timor Timur diselesaikan dengan diberikannya opsi otonomi luas. bagi wilayah tersebut, sehingga rakyat Timor Timur memiliki kewenangan luas dalam bidang politik dan ekonomi, namun dalam hal politik luar negeri dan keamanan merupakan wewenang pemerintah pusat.

Kebijakan yang diberikan oleh Presiden Habibie rupaya tidak membuat rakyat Timor Timur puas dan kembali melancarkan aksi protes. Pemerintahan yang saat itu harus memulihkan keadaan Indonesia pasca terjadinya reformasi, merasa telah menyelesaikan permasalahan Timor Timur. Namun karena rakyat Timor Timur belum puas dengan keputusan yang diberikan pemerintah Indonesia, kemudian Presiden Habibie mengeluarkan opsi baru yang diumumkan Presiden Habibie pada tanggal 27 Januari 1999 yaitu merdeka atau berpisah dari Indonesia.

Konflik yang terjadi di Timor Timur saat menjadi bagian dari wilayah Indonesia banyak menelan korban jiwa, baik dari pihak Timor Timur, maupun Indonesia. Sehingga fokus dalam tulisan ini adalah korban dari konflik yang terjadi di Timor Timur saat Timor Timur berada dalam wilayah Indonesia sebagai provinsi ke-27, khususnya pada masa sebelum dan sesudah jajak pendapat berlangsung pada tahun 1999. Penulis berusaha mencari akar permasalahan dari konflik yang terjadi antara Indonesia dan Timor Timur yang pada puncaknya dikeluarkannya kebijakan dua opsi oleh pemerintah yang justru menyebabkan konflik semakin membesar hingga jatuhnya korban jiwa.

Tulisan ini menggunakan beberapa rujukan, baik dari arsip, buku, koran seaman, maupun artikel. Beberapa buku yang digunakan sebagai rujukan oleh penulis antara lain: Buku-buku yang menjelaskan tentang sejarah Timor Timur, yang pertama, *FUNU; Perjuangan Timor Lorosae Belum Selesai* karya Jose Ramos Horta. Dalam buku ini Horta menggambarkan perjalanan sejarah Timor Timur, mulai dari masa penjajahan Portugis hingga masa perjuangan Timor Timur lepas dari Indonesia; Buku kedua berjudul *Gerakan Pembebasan Nasional Timor Lorosae* Oleh Helen Marry Hill. Buku ini berisi tentang partai komunis di Timor Timur yaitu Fretelin (*Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente*). Marry Hill membahas lengkap tentang awal mula berdirinya partai Fretelin hingga perjuangan Fretelin dalam merebut kemerdekaan Timor-Timur yang berujung pada lepasnya Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1999; Buku ketiga yang digunakan oleh penulis yaitu *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM Indonesia, Timor Leste, dan Lainnya* oleh Andrey Sujatmoko. Buku ini berisi tentang berbagai tindak pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dan salah satunya kasus Timor-Timur, pada saat opsi jajak

¹ Avelio M. Coelho, *Dua Kali Merdeka, Esei Sejarah Politik Timor Leste*, Yogyakarta: Djaman Baroe, 2012, Hlm 2.

² *Ibid* Hlm. 48

³ *Ibid*. Hlm. 50

pendapat diberikan, banyak terjadi pelanggaran HAM terutama kekerasan yang diterima oleh rakyat Timor akibat dari tidak stabilnya kondisi Timor Timur pada masa jajak pendapat melalui pendekatan hukum; Peneliti juga menggunakan buku yang berjudul *Dua kali merdeka, Esensi sejarah politik Timor Leste* oleh Avelino M. Coelho. Buku ini berisi pembahasan lengkap tentang perkembangan perpolitikan Timor-Timur, yang telah dua kali merdeka merupakan fokus dari buku ini

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelaahan jajak pendapat di Timor Timur adalah metode sejarah. Metode sejarah adalah sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis untuk memberikan bantuan dalam pengumpulan sumber, penilaian kritis dan menyajikannya yang biasanya dalam bentuk tertulis.⁴

Langkah awal yang dilakukan dalam metode penelitian ini yaitu penelitian sumber (Heuristik), berupa surat kabar atau majalah yang memuat berita tentang jajak pendapat di Timor Timur tahun 1999, buku tentang sejarah Timor Timur, serta buku yang membahas tentang jajak pendapat di Timor Timur. Sumber yang didapat oleh peneliti yaitu artikel mengenai integrasi Timor Timur kedalam wilayah Indonesia dalam Koran *Kompas* tahun 1976, artikel yang membahas tentang proses jajak pendapat di Timor Timur dalam Koran *Kompas* tahun 1999 hingga 2000, Koran *Republika* tahun 1999, koran *Antara* tahun 1999, majalah *Tempo* tahun 1999 dan mengumpulkan buku-buku yang membahas tentang sejarah Timor Timur serta buku yang membahas tentang jajak pendapat di Timor Timur.

Peneliti juga mendapatkan sumber primer berupa arsip yaitu Petisi Rakyat Timor Timur tahun 1975 yang berisi keinginan rakyat Timor Timur untuk berintegrasi kedalam wilayah Indonesia, dan arsip Keputusan DPR RI tentang Pengesahan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1976. Semua sumber didapatkan dari Arsip Nasional Jakarta, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Daerah Surabaya dan Sidoarjo. Data sekunder sebagai pendukung penelitian diperoleh dari buku yang berjudul *Timor Timur, The Untold Story* karya Kiki Syahmarki tahun 2013, *Saksi Mata Perjuangan Integrasi Timor Timur* karya Hendro Subroto tahun 1997, *Indonesia Diambang Perpecahan* karya Syamsuddin Haris tahun 1999, dan lain-lain.

Langkah selanjutnya adalah melakukan kritik dari sumber yang telah dikumpulkan. Sumber yang telah dikumpulkan kemudian dipilih sumber yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Setelah memilih sumber yang relevan, dilakukan identifikasi keotentikan sumber yang digunakan. Setelah didapatkan sumber yang relevan dan otentik, langkah selanjutnya adalah mengurutkan peristiwa sejarahnya, yaitu

⁴ Aminuddin Kasdi, *Memahami Sejarah*, Unesa University Press, Surabaya, 2005, Hlm. 7

perkembangan wilayah Timor Timur, dari saat bergabung dengan Indonesia hingga berpisah dari Indonesia. Setelah data diurutkan, kemudian diinterpretasikan dan dituliskan dengan historiografi yang menarik.

PEMBAHASAN

Hak untuk menentukan nasib sendiri akan diberikan melalui proses dekolonisasi yang akan dikerjakan oleh pemerintah Portugal yang baru berdasarkan mandat dari PBB. Sehingga pada tanggal 13 Mei 1974 Gubernur Portugis untuk Timor Portugis Dr. Lemos Pires membentuk komisi untuk Penentuan Nasib Sendiri Timor Portugis. Menurut naskah konstitusi yang disiarikan di Lisbon tanggal 12 Juli 1975, Timor Portugis tetap menjadi jajahan Portugal sampai bulan Oktober 1978,⁵ namun Pemerintah Portugal juga mendukung penuh terhadap pembentukan partai dan memberikan kesempatan kepada masing-masing partai politik untuk memperkenalkan gagasan politik dari masing-masing partai, mempersiapkan rakyat, dan ikut serta dalam pemilihan umum guna menentukan nasib Timor Portugis. Dalam hal ini, tiga pilihan politik yang diakui oleh Portugal dan PBB adalah: tetap bersama dengan Portugal, berintegrasi dengan salah satu Negara, dan merdeka penuh.

Pada 11 Agustus 1975 UDT dibawah pimpinan Fransisco Xavier Lopez da Cruz mengadakan kudeta yang bertujuan untuk memberantas paham komunis di Timor Portugis.⁶ Kudeta tersebut memunculkan reaksi dari pihak Fretilin, hingga kemudian menyebabkan terjadinya konflik. Konflik antara UDT dan Fretilin menyebabkan kekacauan hingga seluruh wilayah Timor Portugis dikuasai oleh pihak Fretilin. Timor Portugis menghadapi masa-masa sulit akibat dari konflik antara UDT dan Fretilin, selain itu sikap tidak peduli dari Pemerintah Portugis atas konflik ini, yang ditandai dengan hijrahnya Gubernur Portugis untuk Timor Portugis Dr. Lemos Pires menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan. Sebagian warga Timor Portugis mengungsi ke wilayah Indonesia, khususnya wilayah Nusa Tenggara untuk menghindari konflik.

Pihak Fretilin secara *de facto* menguasai seluruh wilayah Timor Portugis dan membentuk pasukan perang hingga di garis perbatasan wilayah Republik Indonesia. Akibat dari perginya Gubernur Lemos Pires yang menyebabkan terhentinya proses dekolonisasi, menyebabkan Fretilin mengadakan proklamasi

⁵ Koran *Antara*, Edisi 21 Juli 1975, "Timor Portugis Akan Merdeka Tahun 1978"

⁶ Koran *Kompas*, Edisi 7 Juli 1975, "Ucapan Lopez da Cruz"

kemerdekaan sepihak pada 28 November 1973.⁷ Pada hari yang sama, pemerintahan Timor Portugis dibentuk, dengan Xavier do Amaral sebagai presidennya. Fretilin menganggap bahwa hak penentuan pendapat sendiri identik dengan kemerdekaan, dan kemerdekaan itu identik dengan Fretilin sendiri. Hal tersebut yang menjadikan alasan bagi Fretilin untuk melakukan perjuangan dan proklamasi kemerdekaan secara sepihak.⁸

1. Integrasi Timor Timur ke dalam Wilayah Indonesia

Kekacauan yang semakin meluas akibat dari proklamasi sepihak yang diumumkan oleh Fretilin ditanggapi dengan penggabungan dari beberapa partai di Timor Portugis, antara lain partai UDT, KOTA, Apodeti dan Trabalista. Penggabungan dari empat partai politik ini hendak membahas tentang masa depan rakyat Timor Portugis serta keinginan rakyat Timor Portugis untuk bergabung dengan Indonesia. Gabungan partai ini mengadakan pertemuan yang kemudian menghasilkan sebuah keputusan yang juga disebut dengan Deklarasi Balibo pada tanggal 30 November 1975. Inti dari deklarasi tersebut menyatakan kehendak Timor Portugis untuk bergabung dengan Republik Indonesia.

Setelah deklarasi dibacakan, pasukan gabungan keempat partai semakin meningkatkan tekanannya terhadap kedudukan pasukan Fretilin. Sampai pada 2 Desember 1975, pasukan gabungan dari empat partai telah berhasil menguasai beberapa kota. Fretilin yang ternyata tidak mendapat tempat di hati rakyat, terpaksa memusatkan pertahanan mereka di kota Dili.

Untuk menjaga keamanan Timor Timur dari penyerangan pihak Fretilin, pada tanggal 7 Desember 1975 diadakan operasi Seroja oleh pasukan Indonesia di Timor Timur. Dibentuknya operasi seroja dengan pertimbangan dan analisa lapangan setelah melihat pergerakan pasukan Fretilin yang semakin kejam.⁹

Perserikatan bangsa-bangsa turut memantau perkembangan situasi yang terjadi di Timor Timur. PBB menaruh perhatian khusus pada permasalahan Timor Timur terutama dengan pengakuan kemerdekaan sepihak yang dilakukan oleh Fretilin tahun 1973. PBB takut akan semakin meluasnya efek domino, terutama setelah jatuhnya Ho Chi Minh City di Vietnam ke tangan komunis dan berdampak dengan diusirnya Amerika Serikat dari Vietnam.

Demi menjaga Timor Timur tidak jatuh ke kantong komunis, Australia dan Amerika Serikat menyetujui keinginan rakyat Timor Timur untuk bersatu dengan Indonesia. Setelah menerima petisi tersebut, Pemerintah Indonesia memproses pengambilan keputusan pengintegrasian wilayah Timor Timur,

Kemudian Pemerintah R.I. membentuk dan mengirimkan delegasi untuk memperoleh gambaran secara langsung kehendak rakyat Timor Timur. Setelah mengadakan peninjauan ke berbagai wilayah di Timor Timur tanggal 29 Juni 1976,¹⁰ kemudian, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Penyatuan Timor Timur ke dalam negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pada sidang Pleno DPR-RI secara aklamasi pimpinan dan anggota Dewan menyetujui dan kemudian mengesahkannya dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1976 tanggal 17 Juli 1976. Dalam Undang-Undang itu dimuat tentang Penyatuan Timor Timur secara *de jure* kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus pembentukan Timor Timur sebagai provinsi ke-27.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, tempat ibadah dan tempat umum lainnya mulai dilakukan guna menggantikan kerusakan yang terjadi akibat proses dekolonisasi yang terkatung-katung. Pemerintah juga mulai memetakan sumber daya alam yang tersimpan di Timor Timur untuk dieksplorasi.¹¹

Pembangunan sumber daya manusia juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia. pendidikan merupakan bidang yang sangat vital dalam pembangunan sumber daya manusia. Dalam bidang pendidikan, pemerintah Indonesia mengirimkan 1500 guru SD, SMP dan SMA secara bertahap dari Pulau Jawa dan Sumatera serta membangun 115 sekolah SD, SMP dan SMA di Timor Timur.¹² Penataran P4 merupakan program yang wajib untuk dipelajari para murid. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan di sekolah. Pemerintah memahami bahwa pendidikan yang memegang peranan penting dalam pembentukan karakter bangsa, sedangkan rakyat Timor Timur merupakan rakyat yang baru menjadi bagian dari Indonesia, sehingga pembentukan karakter rakyat Timor Timur menjadi rakyat Indonesia merupakan program pemerintah yang dimulai dari generasi muda, yaitu anak-anak yang masih bersekolah.

Dalam bidang pertahanan, pemerintah Indonesia membentuk Operasi Flamboyan yang dikendalikan oleh Asisten I/Intelijen Departemen Pertahanan Keamanan yang dipimpin oleh Komandan Grup II/Kopasandha Kolonel Dading Kalbuadi yang berwenang untuk menjaga pertahanan dan keamanan di Timor Timur. Ketegangan antara oknum militer dengan rakyat Timor Timur terus berlanjut. Pada 12 November 1991

⁷ X. Amaral, *Naskah Proklamasi Kemerdekaan RDTL 28 November 1975*.

⁸ Koran *Kompas*, Edisi 1 Desember 1975, "Portugal Tidak Lagi Bertanggungjawab Terhadap Timport"

⁹ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *op. cit.*, Hlm 150.

¹⁰ Ringkasan Eksekutif Publikasi Komnas Perempuan, *Laporan Inverstigasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur, Maluku, Tanjung Priok dan Papua*, 2000, Hlm 3.

¹¹ Domingos M. Soares, *Timor Timur Kasus Paling Memalukan PBB*, Jakarta: Setiahati Press, 2002, Hlm 30

¹² F.X. Lopez da Cruz, *op cit*, Hlm 34.

merupakan puncak ketegangan antara oknum militer dan rakyat Timor Timur, peristiwa tersebut dikenal dengan Insiden Santa Cruz. Insiden Santa Cruz (juga dikenal sebagai Pembantaian Santa Cruz) adalah penembakan pemrotes Timor Timur di kuburan Santa Cruz di ibu kota Dili. Para pemrotes yang sebagian besar adalah mahasiswa, mengadakan aksi protes terhadap pemerintahan Indonesia pada penguburan rekan sesama mahasiswa yang bernama Sebastião Gomes, yang diduga ditembak mati oleh pasukan militer Indonesia sebulan sebelumnya.¹³

2. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik Timor Timur Bersama Indonesia

Setelah Timor Timur masuk dalam wilayah Indonesia, keadaan sosial, politik dan ekonomi rakyat Timor Timur mengalami perubahan. Dalam bidang sosial, pemerintah Indonesia berusaha membentuk rakyat Timor Timur menjadi orang Indonesia, yang diwujudkan dalam berbagai hal, seperti penataran P4 yang bertujuan agar rakyat Timor Timur memahami Dasar Negara Indonesia serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Selain itu bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang wajib untuk dipelajari dan digunakan dalam percakapan sehari-hari.¹⁴ Struktur sosial masyarakat Timor Timur juga mengalami perubahan. Saat Timor Timur menjadi jajahan Portugis, status sosial tertinggi berada pada para pemuka agama, yaitu Paus, dan setelah Timor Timur masuk kedalam Indonesia, status sosial tertinggi berubah, bukan pemuka agama, melainkan pejabat pemerintah.¹⁵

Pemerintah Indonesia menginginkan ketercapaian proses integrasi secara penuh. Setelah melakukan serangkaian pembangunan fisik dan sumber daya manusia, pemerintah telah berhasil mewujudkan integrasi wilayah, namun bukan integrasi bangsa. Program yang diberlakukan oleh pemerintah di Timor Timur secara perlahan mengikis identitas asli rakyat Timor Timur. Seperti diberlakukannya kewajiban menggunakan bahasa Indonesia yang kemudian menyebabkan bahasa asli rakyat Timor Timur, yaitu bahasa Tetun perlahan tidak mendapat tempat didalam pergaulan rakyat Timor Timur. Selain itu pemerintah juga melakukan indoktrinasi pancasila bagi rakyat Timor Timur yang menyebabkan ideologi rakyat yang berdasarkan keagamaan yang selama ini dianut tidak lagi memiliki ruang.¹⁶

Dibidang politik, wewenang politik di Timor Timur berada ditangan pemerintah Indonesia. pemerintah merombak segala birokrasi lama di Timor Timur. Struktur pemerintahan daerah peninggalan Portugis diubah dan disamakan dengan pemerintahan di Indonesia. seperti *Concelho* diubah menjadi kabupaten; *postos administrativos* menjadi kecamatan; *administradov* menjadi bupati; *cheve de posto* menjadi camat; *sucos* menjadi desa; dan *pavoacao* menjadi Rukun Tetangga.¹⁷

Selain itu sistem birokrasi baru yang diterapkan di Timor Timur, yaitu pejabat pemerintahan berasal dari kalangan politisi. Hal ini jelas berbeda dengan saat Timor Timur sebelum dan saat penjajahan Portugis yang menempatkan Paus sebagai pemegang kewenangan tertinggi di wilayah Timor Timur. Dengan dirubahnya kebijakan ini, mengakibatkan pejabat pemerintah yang cenderung tidak dipatuhi dan tidak disegani oleh rakyat Timor Timur. Rakyat Timor Timur masih terbiasa dengan kepemimpinan seorang Paus, dan bagi masyarakat yang mayoritas nasrani, perkataan Paus selalu menjadi pedoman bagi kehidupan mereka.¹⁸ Permasalahan Timor Timur masih menjadi sengketa bagi Indonesia dan PBB. PBB belum mengakui integrasi Timor Timur kedalam wilayah Indonesia.

Bidang perekonomian di Timor Timur juga mengalami perubahan, seperti diberlakukannya mata uang Rupiah dalam perdagangan di Timor Timur, selain itu dilakukannya nasionalisasi terhadap gedung-gedung serta peninggalan perniagaan Portugis dan dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian rakyat Timor Timur.¹⁹ Semenjak wilayah Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia, banyak pedagang dari Sumatra dan Jawa datang dan berdagang di Timor Timur.²⁰ Bahan makanan di Timor Timur sebagian besar berasal dari Nusa Tenggara Timur, hal ini dikarenakan iklim Timor Timur yang sangat panas sehingga tidak semua bahan makanan dapat diproduksi sendiri oleh masyarakatnya.

Pertumbuhan ekonomi di Timor Timur perlahan dapat berkembang dengan maraknya perdagangan yang dilakukan oleh pedagang dari luar Timor Timur. Namun pertumbuhan ekonomi semakin lama makin menjadi ajang monopoli perdagangan. Perekonomian dikuasai oleh orang-orang luar Timor Timur dan rakyat Timor Timur justru hanya menjadi konsumen.²¹ Perekonomian di Timor Timur diklasifikasikan sebagai perekonomian dengan pendapatan menengah kebawah oleh Bank Dunia. Timor Timur berada di peringkat 158 dengan tingkat perkembangan manusia 20% penduduk menganggur dan

¹³ D. G. E. Hall, *Sejarah Asia Tenggara*, Surabaya: Usaha Nasional, 1988, Hlm 33

¹⁴ Hendracaroko Marpaung. *Timor Timur Menyerang Indonesia*. Yogyakarta: Galangpress. 2009. Hlm 66

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Hendracaroko Marpaung, *op. cit.*, Hlm 66.

¹⁷ Avelio M. Coelho, *op cit.*, Hlm 51.

¹⁸ Hendracaroko Marpaung, *op cit.*, Hlm 50.

¹⁹ Avelio M. Coelho. 2012. *Op Cit.* Hlm 52.

²⁰ Lela E. Madjiah, *Timor Timur Perginya Si Anak Hilang*, Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2002, Hlm 105.

²¹ *Ibid.*

52,9% hidup dengan pendapatan US \$ 1,25 per hari. Tiga Bank asing yang memiliki cabang di Dili adalah ANZ National Bank, Banco Nacional Ultramarino dan Bank Mandiri.²²

3. Masalah Timor Timur Dengan Jajak Pendapat

Banyak permasalahan yang diwariskan rezim Orde Baru pada pemerintahan Reformasi, termasuk konflik yang terjadi di Timor Timur. Timor Timur telah menjadi provinsi ke-27 di Indonesia, namun wilayah ini juga belum redam dari konflik. Telah terjadi banyak permasalahan di wilayah Timor Timur selama 21 tahun bersama Indonesia, dari mulai permasalahan pembangunan yang tidak merata di wilayah Timor Timur, pendidikan yang belum merata karena pendidikan hanya bisa didapatkan oleh anak-anak Timor Timur yang berada di kota, sedangkan wilayah desa belum tersentuh pendidikan, dan permasalahan Santa Cruz yang menjadi sorotan dunia internasional, hingga menumbuhkan benih-benih perjuangan rakyat Timor Timur untuk lepas dari Indonesia.

Pendapat lain dikemukakan oleh Mario Viegas Caracaslaio, mantan Gubernur Timor Timur tersebut berpendapat bahwa akar dari seluruh kegelisahan masyarakat hingga melahirkan sejumlah tindak perlawanan pada pemerintah adalah sikap egosentris pemerintah pusat. Pemerintah pusat terlalu ingin memegang kendali, sehingga rakyat merasa semakin menuju sistem komunis yang serba sentralistis.²³

Dalam usaha penyelesaian permasalahan Timor Timur, Presiden B.J Habibie mengeluarkan kebijakan untuk memberikan otonomi khusus. Namun nyatanya kebijakan Otonomi Khusus yang diberikan Pemerintah Indonesia tidak dapat meredam gejala konflik yang semakin meluas. Kondisi Timor Timur yang sedang mengalami krisis kepercayaan akibat dari luka peristiwa Santa Cruz tahun 1991 menjadi ladang subur bagi Fretilin yang masih menyimpan ambisi untuk mewujudkan kemerdekaan di Timor Timur. Gerakan Fretilin berkembang dengan pesat dan memperoleh banyak dukungan dari masyarakat. Fretilin juga melakukan kegiatan diplomasi ke Negara tetangga, terutama Australia. Australia adalah salah satu negara yang sangat mendukung proses integrasi Timor Timur ke Indonesia. Namun saat krisis moneter melanda Indonesia dan Timor Timur ingin mencari dukungan dari Australia yang dilakukan oleh Ramos Horta.

Dunia internasional, khususnya Australia, Amerika dan Uni-Eropa semakin gencar membawa permasalahan Timor Timur dalam agenda Internasional. Timor Timur selalu menjadi agenda rutin dalam sidang PBB. Diplomasi Timor Timur diwakili oleh Ramos Horta

yang dengan gencar melakukan lobi-lobi ke Australia hingga Horta mendapat dukungan dari seorang aktivis Australia bernama David Scott yang berhasil maju berbicara untuk memperjuangkan Timor Timur di Forum PBB di New York.²⁴ Desakan dari dunia internasional, tuntutan dari rakyat Timor Timur, serta konflik yang terjadi di Timor Timur yang menyebabkan banyak jatuhnya korban jiwa merupakan permasalahan yang harus secara cepat diselesaikan oleh Presiden Habibie.

4. Pra Jajak Pendapat di Timor Timur

Pada 29 Januari 1999 kebijakan baru diambil oleh Pemerintah Habibie, yaitu memberikan opsi tambahan pada rakyat Timor Timur, yang sebelumnya hanya diberikan satu opsi, yaitu otonomi khusus, kemudian berkembang menjadi dua opsi, yaitu opsi otonomi khusus yang berarti Timor Timur berada dalam kesatuan NKRI dan diberi otonomi khusus dengan kewenangan luas di bidang politik, ekonomi, kebudayaan dan lainnya, dengan catatan pemerintah pusat memegang tiga kewenangan; politik luar negeri, keamanan eksternal serta moneter dan fiskal, dan opsi merdeka, atau lepas dari Indonesia dan menjadi Negara yang berdaulat. Bagi presiden Habibie masa depan Timor Timur tidak boleh hanya ditentukan oleh Jakarta, tetapi oleh seluruh rakyat di tanah Loro Sae. Gagasan pemerintah tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya pemerintah tidak keberatan untuk melepas wilayah Timor Timur jika memang itu kehendak dari rakyat Timor Timur, karena pada awalnya Indonesia bukanlah penjajah Timor Timur, tetapi Timor Timur yang ingin menjadi bagian dari Indonesia. Pemerintah tidak sependapat pada anggapan bahwa melepas Timor Timur akan memicu perang saudara, sebab sejarah panjang Timor Timur memang sarat dengan konflik bersenjata.²⁵

Dengan diberikannya dua opsi oleh pemerintah Indonesia, penyelesaian konflik di Timor Timur telah mengalami babak baru. Rakyat Timor Timur memiliki dua pilihan, yaitu opsi pertama, otonomi khusus atau opsi kedua yaitu merdeka. Apabila musyawarah telah mencapai mufakat, dan rakyat Timor Timur menolak otonomi khusus dan memilih memisahkan diri, maka Indonesia akan mengembalikan status Timor Timur sebagai daerah *non self-governing territory* kepada PBB dan Portugal. Namun, yang menentukan lepas atau tidaknya wilayah ini adalah rakyat Timor Timur sendiri, sehingga Indonesia tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan kemerdekaan, karena sekali lagi, Indonesia bukanlah negara penjajah Timor Timur. Ketika Kebijakan 'dua opsi' diumumkan, seluruh rakyat Indonesia sangat terkejut. Telah ribuan nyawa tentara Indonesia melayang, trilyunan rupiah dibelanjakan guna pembangunan wilayah Timor Timur, namun saat Indonesia berjuang keras meredam dan mempertahankan wilayah Timor Timur untuk tetap dalam kesatuan NKRI, tiba-tiba kebijakan Timor Timur dirubah secara drastis.

²² CM. Rien Kuntari, *TIMOR TIMUR Satu Menit Terakhir – Catatan Seorang Wartawan*, Bandung: Mizan, 2008, Hlm 105.

²³ Majalah *Tempo*, Edisi 1 Februari 1999. "Debat Negara Federasi"

²⁴ Avelio M. Coelho, *op. cit.*, Hlm 56

²⁵ *Ibid.* Hlm 228.

Suasana Timor Timur menjadi semakin panas, ketika masing-masing kelompok pro-kemerdekaan maupun kelompok pro-integrasi saling melawan, dan usaha dari pihak militer Indonesia untuk meredam pertikaian yang terjadi sehingga sering terjadi jatuhnya korban jiwa. Harus diakui, penyebab dari kerusuhan sesungguhnya adalah rakyat Timor Timur sendiri. Upaya perdamaian sering dilakukan, dan puncaknya terjadi pada 21 April di Dili. Kelompok pro-kemerdekaan yang diwakili CNRT, Falintil dan kelompok pro-integrasi mengadakan perundingan akibat dari banyaknya kasus kekerasan dan teror yang terjadi. Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa masing-masing pihak akan berupaya menghentikan segala bentuk permusuhan, intimidasi, teror dan kekerasan untuk menciptakan suasana damai di Timor Timur.²⁶

5. Jajak Pendapat di Timor Timur

Menindaklanjuti rencana penyelesaian Timor Timur, tanggal 16 Februari 1999 diadakan pertemuan Segitiga antara RI-PBB-Portugal di markas PBB, New York. Dalam pertemuan ini disepakati bahwa status Timor Timur harus ditentukan sendiri oleh rakyat Timor Timur melalui jajak pendapat. Kemudian tanggal 12 maret 1999 terjadi perundingan yang menghasilkan naskah kesepakatan Indonesia dan Portugal untuk mengadakan pemungutan suara langsung.²⁷

Indonesia merupakan penyelenggara jajak pendapat. Peserta yang mengikuti jajak pendapat adalah seluruh warga Timor Timur, warga Timor Timur yang berada di luar wilayah Timor Timur, serta warga Timor Timur yang dapat menunjukkan kartu identitas sebagai warga asli Timor Timur dan berada di luar negeri. Usia minimal untuk mengikuti jajak pendapat adalah 17 tahun. Pendaftaran untuk mengikuti jajak pendapat dibuka pada tanggal 17 Juli 1999. Hingga tanggal 2 Agustus 1999 sebanyak 378.302 warga Timor Timur telah terdaftar untuk mengikuti jajak pendapat yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Agustus 1999.²⁸

Jajak pendapat ini diawasi oleh tim penasihat kepolisian dari enam negara: Amerika Serikat, Jepang, Filipina, Jerman, Inggris dan Australia yang tergabung dalam misi PBB untuk Timor Timur (*United Nations Assessment Mission in East Timor – UNAMET*) mulai 10 Mei 1999. Tanggal 11 Juni 1999, Dewan Keamanan PBB telah menerima secara bulat Resolusi No. 1246 yang merupakan mandat legislatif bagi Sekjen PBB untuk membentuk dan menggelar misi PBB di Timor Timur (UNAMET) yang bekerja hingga 30 Agustus 1999 guna mengatur dan melaksanakan penentuan pendapat yang dilaksanakan pada 30 Agustus 1999, sesuai dengan persetujuan New York tanggal 5 Mei 1999.

²⁶ C.M Rien Kuntari, *op.cit*, Hlm 60.

²⁷ Makmur Makka, *op.cit*. Hlm 229

²⁸ Koran *Kompas*, edisi 3 Agustus 1999. "Warga di Luar Tim-Tim Keluhkan Kesulitan Ikuti Penentuan Pendapat"

Dalam masalah keamanan telah disepakati tetap berada dalam kendali pemerintah Indonesia. Sebelum jajak pendapat dilaksanakan, UNAMET telah menentukan delapan kota sebagai pusat pendaftaran peserta jajak pendapat, yaitu: Dili, Baucau, Lospalos, Suai, Oecusse, Maliana, Ermera dan Viqueque. UNAMET menentukan masa kampanye tanggal 14-27 Agustus 1999. Sementara itu, guna mempersiapkan kemungkinan terjadinya kerusuhan setelah pengumuman hasil jajak pendapat, PBB tengah menyusun rencana untuk mendirikan pemerintahan sementara empat tahun di Timor Timur, jika hasil penentuan pendapat dimenangkan oleh pihak pro-kemerdekaan.²⁹ Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa Bangsa Kofi Annan mengusulkan kepada Dewan Keamanan (DK) PBB di New York seperangkat kebijakan tentang Timor Timur, yaitu perpanjangan kehadiran UNAMET dari satu, menjadi tiga bulan setelah penentuan pendapat 30 Agustus.

Tanggal 30 Agustus 1999 merupakan hari bersejarah bagi rakyat Timor Timur. Pada hari itu, rakyat Timor Timur memberikan suara dalam jajak pendapat untuk menentukan status wilayah Timor Timur

Pengumuman hasil jajak pendapat diumumkan pada tanggal 4 September 1999. Hasilnya adalah dari 438.968 suara, sebanyak 344.580 suara (78,2%) memilih berpisah dari Indonesia, dan sebanyak 94.388 suara (21,8%) memilih otonomi khusus.³⁰ Hasil yang diumumkan telah menyatakan keinginan rakyat Timor Timur adalah berpisah dari Indonesia dan menjadi negara yang berdaulat. Menanggapi hasil jajak pendapat rakyat Timor Timur, pemerintah Indonesia menghormati keputusan tersebut, karena hasil yang telah diumumkan merupakan perwakilan dari aspirasi seluruh rakyat Timor Timur.

6. Paska Jajak Pendapat di Timor Timur

Paska jajak pendapat, aktivitas masyarakat Timor Leste masih jauh dari normal. Di sejumlah tempat banyak ditemukan warga yang antre untuk mendapatkan beras, bantuan. Ditempat lainnya juga banyak ditemukan orang antre mendapat pekerjaan. Harga-harga melonjak naik. Beras dijual Rp 50.000 per kg, gula pasir Rp 20.000 per kg, bensin 3.500 per liter. Harga makanan di kantin UNTAET seharga 2-3 US\$ (Rp 20.000-25.000). keadaan ekonomi yang buruk ini akibat dari sistem perdagangan yang lumpuh, masyarakatnya tidak memiliki pekerjaan dan banyak infrastruktur yang rusak akibat bentrokan yang terjadi selama jajak pendapat berlangsung.³¹

²⁹ Koran *Kompas*, Edisi 4 Agustus 1999. *Op. Cit*

³⁰ Koran *Kompas*. Edisi 5 September 1999. "Hasil Jajak Pendapat di Timor Timur"

³¹ Koran *Kompas*, Edisi 29 November 1999. "Timor Timur Merangkak Dari Nol.."

Kemerdekaan penuh yang kini dimiliki oleh rakyat Timor Leste masih harus melalui proses yang panjang untuk menyiapkan lahirnya Negara yang baru. Rakyat Timor Leste harus kembali membangun rumah mereka yang roboh, harus mencari kembali anggota keluarga mereka yang terpisah, serta harus mencari lahan tempat penghidupan mereka. Dengan dibantu UNTAET yang bertugas membantu persiapan lahirnya Negara Timor Leste sampai tiga tahun mendatang.

7. Kerusuhan Paska Jajak Pendapat di Timor Timur

Pengumuman hasil jajak pendapat yang dibacakan pada tanggal 4 September 1999 nyatanya tidak membuat kerusuhan di Timor Leste reda. Hasil jajak pendapat justru menyebabkan kerusuhan kembali muncul. Kali ini kerusuhan terjadi akibat dari kekecewaan dari rakyat Timor Leste yang pro-integrasi terhadap hasil jajak pendapat yang diumumkan.³²

Setelah Timor Leste menjadi Negara yang terpisah dari Indonesia, pemerintahan sementara di Timor Leste berada dibawah pemerintahan transisional PBB yaitu UNTAET. Berdasarkan konstitusi, UNTAET bekerja hingga 20 Mei 2002. Tugas UNTAET adalah membangun kembali segala infrastruktur yang rusak akibat kekerasan setelah jajak pendapat dan menjalankan transisi politik, terutama mempersiapkan pemilihan dewan konstituante untuk menyusun Undang Undang Dasar (UUD) Timor Leste.³³ Sehingga segala permasalahan yang terjadi paska jajak pendapat dan Timor Leste lepas dari Indonesia dibawah pengawasan UNTAET. Kerusuhan yang terjadi akibat dari kekecewaan rakyat Pro-Otonomi Khusus merupakan permasalahan tersendiri bagi UNTAET.

Timor Leste harus merangkak dari nol setelah dinyatakan lepas dari Indonesia. rakyat Timor Leste harus memulai kehidupan mandiri. Masyarakat kembali mencari pekerjaan, berusaha membangun infrastruktur serta mulai menyusun bentuk pemerintahan. Timor Leste masih dibawah pengawasan UNTAET. UNTAET turut membantu Timor Leste dalam membentuk negaranya. Pengembalian stabilitas di Timor Leste bukanlah perkara yang mudah, dengan segala keterbatasan, Timor Leste harus kembali bangkit dan berdiri sebagai sebuah Negara. Disisi lain kerusuhan juga masih terjadi. Hal ini tentu tidak baik bagi masyarakat Timor Leste yang kembali menata kehidupan mereka.

Kerusuhan yang terjadi di Timor Leste pra hingga paska jajak pendapat memiliki pola yang berbeda. Kerusuhan yang terjadi sebelum jajak pendapat merupakan implikasi dari gerakan reformasi saat lengsernya rezim orde baru yang turut memberikan

³² Helen Van Klinken, *Anak-Anak Tim-Tim di Indonesia*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2014, Hlm 158.

³³ Avelio M. Coelho. *Dua Kali Merdeka, Esei Sejarah Politik Timor Leste*, Yogyakarta: Djaman Baroe, 2012, Hlm 8

semangat rakyat Timor Timur untuk lepas dari Indonesia. pada masa itu kerusuhan didominasi oleh gerakan yang menginginkan Timor Timur lepas dari Indonesia, yaitu Fretilin, yang juga merupakan gerakan komunis radikal. Fretilin melakukan berbagai teror yang dilakukan kepada pihak pro-pemerintah dan warga Indonesia yang bekerja di Timor Timur. Saat kampanye dan menjelang jajak pendapat berlangsung, kerusuhan berkembang menjadi kerusuhan kedua golongan, yaitu kelompok pro-kemerdekaan dan kelompok pro-integrasi. Kedua kelompok tersebut saling membentuk kekuatan dari segi politik maupun militer untuk menjangkau suara sebanyak-banyaknya. Paska jajak pendapat dibacakan, dan suara dari kelompok pro-kemerdekaan berhasil memenangkan jajak pendapat, kerusuhan masih terjadi dan dilakukan oleh kelompok pro-integrasi yang kecewa akan hasil jajak pendapat yang telah diumumkan.

8. Korban Jajak Pendapat di Timor Timur

Sesudah terjadinya konflik pada kurung waktu seputar jajak pendapat di bulan Agustus 1999 di Timor Timur, yang kini menjadi Timor Leste, permasalahan kekerasan terhadap kemanusiaan mulai dilakukan penyelidikan.

Penyelidikan diprioritaskan pada lima kasus, yaitu pembunuhan masyarakat sipil di gereja di kota Liquica tanggal 6 April 1999, penyerangan rumah Manuel Carracaslao di Dili tanggal 17 April 1999, pembunuhan masyarakat sipil yang mencari perlindungan di gereja Suai pada 6 September 1999, penyerangan kediaman Uskup Belo tanggal 6 September 1999 dan pembunuhan seorang wartawan Belanda, Sander Thoenes pada 23 September 1999.

(1) Serangan Liquica, sebanyak 2000 orang berlindung dari serangan milisi di kompleks gereja Sao Barito kota Liquica pada 6 April 1999. Kemudian anggota milisi Besi Merah Putih melakukan serangan ke kompleks tersebut. Telah dilaporkan sebanyak seratus orang dibunuh dan empat orang diculik oleh milisi BMP. (2) Serangan di rumah Manuel Carracaslao, dilakukan oleh anggota BMP pada 17 April 1999. Serangan dilakukan setelah rapat umum di kantor Gubernur untuk melantik kelompok payung milisi. 12 orang terbunuh dalam serangan tersebut, termasuk anak tiri Manuel Carracaslao. (3) Serangan ke kediaman Uskup Belo, pada 6 September 1999 pada 5000 orang pengungsi. Serangan tersebut berupa pemukulan dan pembakaran seluruh komplek. Setidaknya tercatat 13 orang tewas dalam penyerangan tersebut. (4) Serangan gereja Suai pada 6 September 1999 dilakukan oleh anggota kelompok milisi Laksaur. Pada saat itu, terdapat 1500 orang yang mengungsi mengalami kekerasan seperti pemukulan dan penembakan. 145 orang dinyatakan tewas dalam kejadian tersebut. (5) pembunuhan Sander Thoenes, wartawan Belanda yang dibunuh di Dili pada 21 September 1999. Pelaku adalah anggota TNI batalyon 754. Sander Thoenes ditembak dibagian dada dan wajahnya dirusak. Belum ditemukan motif dari pembunuhan wartawan tersebut.³⁴

³⁴ Laporan Amnesty International and Judicial System Monitoring Program Hlm 30.

Kekerasan dan kerusakan yang paling banyak ditemukan berupa intimidasi dari kelompok tertentu kepada kelompok yang berlawanan, selain itu pihak keamanan banyak mendapat laporan dari warga yang diteror dengan cara kaca rumah yang dilempari dengan batu.³⁵ Menyikapi keadaan tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (KOMNAS HAM) membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Timor Timur (KPP-HAM) tanggal 22 September 1999 dengan Surat Keputusan No. 770/TUA/IX/99. Mandat KPP-HAM adalah mengumpulkan fakta, data dan informasi tentang dugaan adanya kekerasan yang terjadi di Timor Timur. Penyelidikan dikhususkan pada kemungkinan terjadinya genosida, pembunuhan massal, penganiayaan, pemindahan paksa dan kejahatan terhadap wanita dan anak. Masa kerja KPP HAM terhitung sejak 23 September 1999 hingga akhir Desember 1999 yang kemudian diperpanjang hingga 1 Januari 2000 dengan SK Ketua Komnas HAM No. 857/TUA/XII/99 tanggal 29 Desember 1999.

Tabel 4.1
Laporan KOMNAS HAM di Timor Timur, 2000

Lokasi	Tewas	Luka-Luka	Mengungsi	Lain-Lain
Dili	25			Salah satunya adalah wartawan asal Belanda, Sanders Thoenes
Liquica	30			23 (Kejahatan terhadap wanita)
Kaikalo	6	4		
Rumah Manuel Carascalo	15		50	
Rumah Uskup Belo	2		5000	

³⁵ Majalah *Tempo*, Edisi 27 Juni 1999. "Teror di Tim-Tim, Mengadu di Jakarta"

Maliana	5			
Suai	51		100	
Lospalos	9			

Sumber: Laporan Penyelidikan Hak Asasi Manusia, KOMNAS HAM, Hlm 7-11.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip/Peraturan Perundang-Undangan

- Laporan Singkat Operasi Kemanusiaan PMI-ICRC-UNICEF di Timor Timur s/d Februari 1986
Operasi Perikemanusiaan P.M.I di Daerah Timor Timur, Jakarta 3 Mei 1976
Petisi Rakyat Timor Timur, Jakarta 20 September 1975
Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1976 Tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur Ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur

B. Buku

- Aminuddin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press
Andrey Sujatmoko, *Tanggungjawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM*. Jakarta: Grasindo. 2005.
Avelio M. Coelho, *Dua Kali Merdeka, Esei Sejarah Politik Timor Leste*. Yogyakarta: Djaman Baroe. 2012
B.J Habibie, *Detik-Detik Yang Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. Jakarta: THC Mandiri. 2006
C.M. Rien Kuntari, *Timor Timur Satu Menit Terakhir – Catatan Seorang Wartawan*. Bandung: Mizan. 2008.
D.G.E Hall, *Sejarah Asia Tenggara*. Surabaya: Usaha Nasional. 1988
Domingos M. Soares. *Timor Timur Kasus Paling Memalukan PBB*. Jakarta: Setiahati Press. 2002
E.M. Tomodok, *Hari-Hari Akhir Timor Portugis*. Jakarta: Pustaka Jaya. 1994
F.X Lopez Cruz, *Kesaksian Aku dan Timor Timur*. Jakarta: Yayasan Tunas Harapan Timor Lorosae. 1999
Gunawan Setiarja, *HAM Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius. 1993
Helen Marry Hill, *FRETILIN, Gerakan Nasional Pembebasan Timor Lorosae*. Dili: Yayasan HAK. 2000
Helen Van Klinken, *Anak-Anak Tim-Tim di Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia. 2014
Hendracaroko Marpaung, *Timor Timur Menyerang Indonesia*. Yogyakarta: Galang Press. 2009

- Hendro Subroto, *Saksi Mata Perjuangan Integrasi Timor Timur*. Jakarta: Pustaka Jaya. 1997
- Kiki Syahnarki, *Timor Timur, The Untold Story*. Jakarta: Kompas Gramedia. 2013
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *Sejarah TNI Jilid IV (1960-1983)*. Jakarta: Pusjarah TNI. 2000
- Makmur Makka, *Biografi Bacharuddin Jusuf Habibie; Dari Ilmuwan ke Negarawan Sampai 'Minandito'*. Jakarta: THC Mandiri. 2012
- Syamsuddin Haris, *Indonesia Diambang Perpecahan*. Jakarta: Erlangga Press. 1999

